

Menyikapi Pluralisme Agama di Indonesia

Oleh Moh. Taufiq Rahman

PLURALITAS (kemajemukan) bangsa Indonesia dalam segala bentuknya dapat merupakan potensi konflik yang sewaktu-waktu bisa muncul ke permukaan. Kondisi seperti ini telah melatarbelakangi perpecahan, primordialisme, dan skismatisme yang telah banyak menjurus pada disintegrasi, kerusakan hubungan antar agama, suku, ras, dsb., dan bahkan telah sampai pula pada kenyataan yang cukup pahit dalam sejarah bangsa ini — banyaknya pemberontakan di negeri ini.

Untuk hal ini, pemerintah Indonesia telah banyak menawarkan konsep-konsep yang sekaligus juga kebijakan-kebijakan. Salah satu upaya yang cukup kentara adalah adanya Departemen Agama, sebuah Departemen/Kementerian yang mengurus agama-agama di Indonesia yang seringkali cukup rawan konflik. Selain itu, kalangan cendekiawan pun melirik pula pada persoalan ini, sehingga timbullah ide-ide tentang dialog antar iman.

Pluralitas Indonesia dan Masalah Pembangunan

Ada dua kondisi yang diketengahkan di sini yang menjadi latar belakang keindonesianan (nasionalitas), yaitu kondisi pluralitas dan masalah pembangunan.

Sudah menjadi sebuah fakta yang tidak dapat dibantah bahwa Indonesia ini merupakan negara yang majemuk (plural). Penggunaan kata "pluralisme" (majemuk) oleh para sarjana dalam melihat masyarakat Hindia-Belanda untuk pertama kali digunakan oleh para sarjana ilmu ekonomi atau pemerintahan seperti H.J. Boeke, G.S. Furnivall dan lain-lain. Ia berarti pluralisme dalam arti ekonomi, artinya ada ekonomi kapitalis dan pre-kapitalis, ada berbagai ras, kemajuan, dan lain-lain (*Ong-hokham dalam Seri Dhan I/Tahun 1:180*). Maka, tidak heran jika keadaan majemuk seperti ini memunculkan motto di negara kita: *Bhinneka Tunggal Ika* (*Soedjatmoko, 1988:44*).

Kemajemukan itu memang se-

buah fenomena yang tidak mungkin kita hindari. Kita hidup di dalam kemajemukan dan merupakan bagian dan proses kemajemukan, aktif maupun pasif. Ia menyusup dan menyangkut dalam setiap dan seluruh ruang kehidupan kita (*Dyohan Effendi dalam Dhan I/Th. 1: 54*). Dengan demikian yang berlaku adalah pluralisme.

Kita hidup di dalam suatu kenyataan yang tidak tertutup, yang serba berkembang (*Driffjanow, 1988:62-63*). Jadi, dapatlah disepakati bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat plural.

Sementara itu, yang menjadi kondisi Indonesia selain kemajemukan (pluralitas), adalah masalah pembangunan. Pembangunan memang merupakan tujuan utama Orde Baru, yaitu sebagai sebuah jalan mencapai "Cita-cita '45 dan Pancasila" (*Railhan, 1985:163*). Namun, pembangunan sebagai proses yang kompleks menuju perubahan yang mensejahterakan itu (*Newland, 1994:288*) mempunyai banyak ancaman, baik ancaman keamanan, politik, ataupun yang lainnya yang berbentuk perpecahan (*disintegrasi*). Maka, dalam proses pembangunan ini sangatlah diperlukan adanya kekuatan integratif.

Dari dua keadaan itu dapat ditarik benang merahnya, bahwa pluralisme bentuk-bentuk sosial dan historis itu tidak perlu dilihat sebagai suatu kelemahan. Pluralisme itu dapat meningkatkan kesanggupan umam untuk memberi jawaban efektif kepada perubahan-perubahan situasi dan kepada tantangan-tantangan baru yang muncul dari perubahan-perubahan sosial. Keanekaragaman fenomenologis itu memperbesar fleksibilitas dalam mencari jalan-jalan baru. Tegasnya, pluralitas dapat merupakan aset bangsa yang bermanfaat.

Begitulah, pluralisme ini betul-betul menjadi suatu kebutuhan

manusia untuk hidup berdampingan (koeksistensial) secara damai. Kedamaian itulah yang membuat manusia secara keseluruhan selamat, aman, dan tenteram. Sedemikian perlunya manusia akan keselamatan itu, sehingga para antropolog biasa menyebutnya sebagai suatu *basic drive* (dorongan-dorongan dasar) manusiawi.

Maka kemudian, banyaknya harapan dalam masyarakat dunia sekalipun, akan timbulnya equalitas (penyamaan kedudukan). Inilah yang diharapkan dalam tata dunia baru.

Begitu pula dengan kondisi bangsa ini. Di sini diperlukan adanya kesadaran pluralisme yang mempersatukan (integratif) dan mampu merangkul semua (inklusif). Dari pluralisme inilah kemudian lahir toleransi yang berkekuatan besar untuk mempersatukan bangsa. Dan, dari pluralisme ini pulalah, segala kontradiksi dalam (*inner-contradiction*) tereliminasi. Maka, dengan semangat pluralisme ini juga dapat dipastikan bahwa pembangunan yang masih berkelanjutan ini dapat dilaksanakan dengan sukses.

Pluralisme Agama dalam Keindonesianan

Ketika Indonesia menjadi suatu negara (*state*), agama di wilayah Indonesia sudah sejak sebelumnya ada dalam bentuk yang plural (majemuk). Jadi, sudah sejak Indonesia masih berupa masyarakat (*society*) saja, agama dan kepercayaan yang plural di Indonesia sudah "mengada". Jadi Indonesia (dalam bentuk *nation-state*) mendapatkan kehidupan beragama yang sudah betul-betul majemuk dalam masyarakatnya.

Kini, tinggal bagaimana sikap masyarakat dan pemerintahan Indonesia terhadap kenyataan yang tidak dapat dipungkiri ini.

Setelah Indonesia merdeka, kita

mengenal periode kritis kehidupan beragama pada tahun 1950-an yang ditimbulkan oleh Gerakan Darul Islam, yang memperjuangkan terwujudnya negara Islam. Tidak terpuak pula saat-saat bentrokan Kristen-Islam di Aceh tahun 1950-an, demikian juga di desa-desa Kristen di wilayah Toraja, Sulawesi Selatan. Pada pertengahan tahun 1960-an timbul lagi ketegangan-ketegangan antara Islam dan Kristen. Hal itu terjadi sehubungan dengan tumbuhnya isu Kristenisasi di kalangan umat Islam, sebuah isu yang tetap terasa hingga kini.

Yang menjadi masalah dalam kehidupan beragama di sini adalah masalah penyebaran agama. Inilah yang biasanya menjadi biang terjadinya bentrokan antar umat beragama. Untuk itu, pemerintah Indonesia merasa perlu untuk ikut serta dalam urusan agama. Maka didirikanlah Departemen Agama Republik Indonesia pada tanggal 3 Januari 1956.

Usaha-usaha Departemen Agama untuk upaya kerukunan beragama sejak berdirinya diarahkan pada tercapainya "Trilogi Kerukunan Antar Umat Beragama". Yaitu (1) Kerukunan intern umat beragama, (2) Kerukunan antar umat beragama, dan (3) Kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Untuk maksud-maksud itu penyelenggaraan Proyek Kerukunan diperjar dalam bentuk lokakarya, penyuluhan, kerja sama sosial, dan sebagainya. Dan akhirnya terbentuk Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama.

Tentang hal ini, sebenarnya Presiden Soeharto sejak lama telah mengisyaratkan, "Negara diwajibkan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Gərənanya, menjadi kewajiban Pemerintah untuk mem-

beri kesempatan dan mendorong tumbuhnya kehidupan keagamaan yang sehat di negeri ini" (*CS/S, 1976:27-28*).

Humanisasi Pluralisme

Humanisasi pluralisme adalah pemanusiaan dengan adanya paham pluralitas di atas. Jelasnya, manusia yang tersingkir dalam masalah ekonomi, tertindas dalam masalah politik, termarginalisasi dalam masalah pendidikan, sosial, budaya, dsb. membunahkan diadakannya pemanusiaan (dalam artian pengakuan derajat, ekonomi, politik, pendidikan, sosial, budaya, dsb.).

Upaya ini dapat didasarkan pada elan (semangat) pluralisme, khususnya pluralisme agama. Artinya, pluralisme agama itu dapat dijadikan elan untuk merahmati manusia secara keseluruhan tanpa sekat-sekat agama.

Selama ini, memang telah banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat kita, pemerintah Indonesia, bahkan oleh organisasi-organisasi internasional. Kita sudah banyak melihat institusi-institusi itu memperjuangkan hak-hak asasi manusia (HAM) yang menjadi dasar tujuan humanisasi pluralisme.

Dengan semangat pluralisme ini — terutama pluralisme agama — sangat dipastikan kerukunan beragama akan terwujud dan pembangunan bangsa pun akan semakin menapaki kesuksesan. Jadi, pluralisme betul-betul menjadi kekuatan integratif dalam pembangunan. Bahkan lebih jauh lagi, dengan semangat pluralisme ini akan terciptalah pemanusiaan manusia secara general dan akan terjelma pula keiterbiban alam semesta secara universal.

Di sinilah perlunya memasyarakatkan pluralisme lewat penyiaran dan pengamalan. Dan harapan itu ditujukan pada seluruh manusia, tanpa kecuali.

(Penulis adalah Aktivistis Kelompok Diskusi Al-Qalam IMM Kor-kom IAIN SGD Bandung)